



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RANHIR RENJA) TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir RENJA) Tahun 2025 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2025. Penentuan target dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 yang didasarkan pada sasaran dan indicator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Periode 2021 - 2026. Penyusunan Renja Akhir Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna maka masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dumai, Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan
Perindustriaian Kota Dumai,



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740925 199502 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Pelaporan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran renja perangkat daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	41
BAB V PENUTUP.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025, Merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Peraturan Perundang-undangan tersebut, secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk periode tahunan dan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Secara tidak langsung Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustrian dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

Rencana Kerja dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025 Merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Didas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan penjabaran dari langkah-langkah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian kota Dumai 2021-2026, sehingga Rencana Kerja yang disusun akan menentukan hasil dari keseluruhan proses rencana pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usah Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi.

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang kebijakan industri nasional 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota;
21. Peraturan Menteri koperasi Nomor 18 tahun 2015 tentang pedoman, pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi pengusaha kecil menengah;
22. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09/M.KUKM/10 Tentang pengawasan koperasi tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kemenkopukm;
24. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam penyelenggaraan TKBM;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
30. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
31. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
32. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan industry provinsi Riau Tahun 2018-2038;
36. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
38. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
39. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).
40. Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025 adalah :

- ❖ Sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2025
- ❖ Untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
- ❖ Untuk mengintegrasikan peran berbagai stakeholder terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga, asosiasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor Industri Kota Dumai. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah:
- ❖ Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Kota Dumai serta Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai
- ❖ Terwujudnya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai baik antar Pusat, dan Provinsi Riau.
- ❖ Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan urusan Koperasi, usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Koata Dumai

- ❖ Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan tinggi, dan Koperasi
- ❖ Tercapainya pemanfaatan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai secara efisien dan efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Pada bab ini berisi tentang Telaah kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD-RI.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2022 dan 2023 serta evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021–2026 yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini merupakan data/informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai selama tahun 2021–2026 dan perkiraan realisasi tahun 2023 (mengacu target pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023) yang kemudian dibandingkan dengan pencapaian akhir yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi atau memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Dari 2 (dua) urusan wajib pemerintahan yang difungsikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yakni urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM, urusan pilihan Perindustrian pada tahun 2025 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, diberi wewenang untuk menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam **Urusan Wajib bukan pelayanan dasar bidang Koperasi dan UKM, Urusan Pilihan Perindustrian**. Dari dua urusan ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merencanakan dan menetapkan 1 (satu) program prioritas yaitu : program prioritas untuk Urusan Wajib bukan pelayanan dasar bidang Koperasi dan UKM dan Urusan Pilihan Perindustrian Rancangan Awal Renja Tahun 2025, pada Tahun Anggaran 2025 yang terurai dalam bentuk program kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAAN KOPERASI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaa Koperasi dan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan kunjungan kelapangan untuk pemeriksaan dan pengawasan dokumen kelembagaan koperasi

2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan merupakan kegiatan penilaian kesehatan koperasi, kegiatan HUT Koperasi bagi koperasi yang berprestasi

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pelaksanaan dengan sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi merupakan kegiatan pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi

4. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya merupakan kegiatan pelatihan untuk Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan :
- ❖ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pelaku UMKM. Karena kebanyakan pelaku UMKM sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan kewirausahaan yang memadai sebagai modal dasar dalam menekuni dunia bisnis. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha yang dibangun dan dikelola oleh para UMKM kita pada umumnya diawali oleh seorang yang memiliki ketrampilan teknis membuat produk tertentu, bukan karena keterampilan dalam pemasaran dan manajerial. Karena itu sedikit sekali diantara UMKM itu memiliki kemampuan kewirausahaan (entrepreneur) sedangkan pengusaha yang sukses umumnya memulai usaha dari kemampuan pemasaran dan manajerial, kemudian baru diikuti dengan mendirikan usaha untuk memenuhi pangsa pasar yang potensial. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, ketrampilan dan motivasi bagi pelaku UMKM Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri dan siap bersaing di era pasar global
- ❖ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro

- ❖ Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro merupakan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal
- ❖ Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik merupakan kegiatan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi
- ❖ Penyusunan Basis Data Usaha Mikro merupakan kegiatan pendataan usaha mikro yang ada di Kota Dumai
- ❖ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi merupakan kegiatan memfasilitasi UMKM melalui aplikasi Digiloka

7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku

8. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri dengan sub kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi merupakan kegiatan Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai penyelenggara pemerintah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, adalah lembaga teknis strategis dalam melaksanakan pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya Kota Dumai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D) dan Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, umkm, urusan pemerintahan bidang perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- pembinaan dalam pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil usaha koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;

- pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan
- penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D) dan Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 2. Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPT

Adapun rencana program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2025 dijabarkan dalam 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan dengan Uraian sebagai berikut :

Adapun Analisa kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah sesuai Tabel 2.2. T-C.30

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Usuran Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar											
	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah											
2	17	01	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	17	01	2	01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 13 Dokumen	6 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	9 Dokumen	25 Dokumen	192,31
2	17	01	2	02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10 Dokumen	4 Dokumen	2 laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	80,00
2	17	01	2	03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 4 laporan	1 Dokumen	2 laporan	1 Laporan	50%	2 Laporan	4 Laporan	100,00
2	17	01	2	05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 16 Orang	-	14 Orang	-	0%	14 Orang	14 Orang	87,50
2	17	01	2	06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	200,00
2	17	01	2	07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah 55 Unit	-	138 Unit	-	0%	23 Unit	23 Unit	41,82
2	17	01	2	08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	300,00
2	17	01	2	09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara 38 Unit	52 unit	41 Unit	41 unit	100%	44 unit	137 Unit	360,53

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 17 03 2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40%	90%	35,5%	36,13%	101,77%	35,5%	161,63%	404,08
2 17 03 2 01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	110 Unit Usaha	80 Unit Usaha	100 Unit Usaha/Koperasi	100 Unit Usaha/Koperasi	100%	100 koperasi	280 Unit Usaha	254,55
2 17 04 2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	13,13%	0%	7,13%	0%	0%	7,13%	7,13%	54,30%
2 17 04 2 01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	52 Unit Usaha	-	42 Unit Usaha/Koperasi	-	0%	42 koperasi	42 Koperasi	80,77
2 17 05 2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	25,55%	0%	21,55%	0%	0%	21,55%	21,55%	84,34%
2 17 05 2 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	70 Orang	-	50 Orang	-	0%	60 orang	60 Orang	85,71
2 17 06 2	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40%	0%	35,5%	49,03%	138,11%	35,50%	35,50%	88,75
2 17 06 2 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	22 Orang	-	20 Koperasi	20 Koperasi	100%	20 Orang	20 Orang	90,91
2 17 07 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	25%	20%	15%	13,67%	91,13%	15%	48,67%	194,68
2 17 07 2 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro	11.000 UMKM	1507 UMKM	3986 UMKM	3825 UMKM	98,94%	7560 UMKM	12892 UMKM	117,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan/Sub kegiatan (Renja SKPD tahun 2024)	Perkiraan Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023	Ralisasi Renja SKPD tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 17 08 2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah UMKM yang dibina	7%	-	4%	4%	100%	4%	4%	57,14
2 17 08 2 01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina	115 UMKM	-	150 UMKM	150 UMKM	100%	200 Unit Usaha	450 UMKM	391,30
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3 31 02 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	78%	0%	75%	40%	53,33%	75%	115%	147,44
3 31 02 2 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	4 Dokumen	-	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	4 Dokumen	5 Dokumen	125,00
3 31 03 2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	30%	0%	15%	0%	0%	15%	15%	50,00
3 31 03 2 01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	2 Dokumen	-	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	40,00
3 31 04 2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	70%	0%	60%	-	0%	60%	60%	85,71
3 31 04 2 01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	3 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	66,67

Tabel 2.2 (T-C30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Dumai

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi Aktif			70,58%	71%	72%	73%	65,16%		72%	73%	Masih ada pengurus koperasi yang belum menguasai tentang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan koperasi dan manajemen kepengurusan sehingga berdampak kepada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi serta lambatnya pengembangan usaha koperasi dan Kurangnya Anggaran Untuk Mendukung Tercapainya Indikator
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			45%	55%	56%	58%	22,13%		56%	58%	aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya dan Kurangnya Anggaran Untuk Mendukung Tercapainya Indikator
3	Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB			63,9%	65,9%	66,2%	67%	7,72%		66,2%	67%	Belum adanya tenaga penyuluh Industri dan Kurangnya anggaran yang menjadi pendukung tercapainya indikator kinerja utama dan Visi Misi Walikota
4	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin			13%	14%	15%	16%	4,33%		15%	16%	Belum adanya Tenaga Penyuluh Industri dan Kurangnya anggaran yang menjadi pendukung tercapainya indikator kinerja utama dan Visi Misi Walikota

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan perindustrian

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Restra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD). Sebagaimana kita ketahui bahwa orientasi pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di Kota Dumai, diperlukan adanya dukungan kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai belum optimal, baik dalam memberi layanan publik maupun dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat umumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam upaya mendukung program dan kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi daerah, masih dijumpai adanya berbagai kendala internal, yaitu :

Permasalahan Internal

- Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin serta produktivitas;
- Kurangnya kualitas SDM yang memadai

Permasalahan Eksternal

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

- Perkembangan kinerja koperasi yang belum optimal disebabkan karena :
 - ❖ Masih ada pengurus koperasi yang belum mentaati/mematuhi ketentuan tentang kelembagaan koperasi.
 - ❖ Masih ada pengurus koperasi yang belum menguasai tentang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan koperasi dan manajemen kepengurusan sehingga berdampak kepada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi serta lambatnya pengembangan usaha koperasi.
 - ❖ Belum optimalnya pengawasan koperasi
 - ❖ Belum optimalnya kegiatan penilaian koperasi
 - ❖ Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya.
 - ❖ Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas Halal dan izin lainnya (PIRT).
 - ❖ Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.
 - ❖ Kurangnya Daya Saing produk UMK
 - ❖ Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi pelaku UMK

Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

- ❖ Angka pengangguran masih cukup tinggi;
- ❖ Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
- ❖ Rendahnya kualitas SDM industri kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi;
- ❖ Belum tersedianya penataan kawasan industri;
- ❖ Belum tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota Dumai.
- ❖ Daya saing, inovasi dan kualitas produk-produk IKM masih rendah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Dumai RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan akhir RKPD 2024 dengan hasil analisa kebutuhan pada RKPD 2025, adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31. dibawah ini.

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.145.847.005	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.684.297.005	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	17.473.193	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	34.456.193	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.558.185	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.558.185	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.452.450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.452.450	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.466.345	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.466.345	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	7.444.713	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	24.427.713	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	8 Dokumen	4.201.868.145	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	8 Dokumen	4.213.859.195	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.154.796.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.154.796.800	
	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.695.295	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.695.295	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7 Laporan	43.376.050	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7 Laporan	55.367.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dumai	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	2 Laporan	43.338.800	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dumai	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah	2 Laporan	43.338.800	
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Dumai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.338.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	43.338.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14 Orang	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	14 Orang	50.000.000	
	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	10 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	10 Orang	50.000.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	444.327.742	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	577.732.852	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.781.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.781.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	68.692.838	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	98.149.838	
	penyediaan peralatan rumah tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	21.250.074	penyediaan peralatan rumah tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	21.250.074	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	21.624.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	21.624.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	20.005.730	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	20.005.730	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.940.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.940.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dumai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	4.125.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dumai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	4.125.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	292.908.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	396.856.510	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Persentase pengadaan barang milik daerah	11 Unit	195.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Persentase pengadaan barang milik daerah	11 Unit	415.499.405	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Unit	90.000.000	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7 Unit	90.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	105.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	105.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	220.499.405	Untuk melakukan pembinaan mental spritual dan tempat parkir belum ada
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dumai	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Laporan	1.054.658.160	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Dumai	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3 Laporan	1.060.690.560	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.370.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.370.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	202.926.240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	202.926.240	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	849.361.920	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	855.394.320	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	persentase pemeliharaan barang milik daerah	44 unit	189.180.965	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	persentase pemeliharaan barang milik daerah	44 unit	288.720.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.000.000	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	103.820.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	137.380.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	15.840.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	15.840.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.520.965	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.500.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dumai	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,5%	-	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dumai	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,5%	947.000.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	100 koperasi	-	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	100 koperasi	947.000.000	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dumai	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	-	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dumai	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit Usaha	473.500.000	Merupakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan tata kelola kelembagaan koperasi berdasarkan Undang-undang tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan dan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan Permenkop dan UKM No. 09/PER/M.KUKM/X/2020 tentang pengawasan Koperasi
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	-	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	473.500.000	Merupakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan tata kelola kelembagaan koperasi berdasarkan Undang-undang tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2001 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, UKM dan petunjuk teknis deputy bidang perkoperasi No.15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dumai	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,13%	150.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dumai	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,13%	757.850.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	42 koperasi	150.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	42 koperasi	757.850.000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	21 Unit usaha	75.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	21 Unit usaha	564.250.000	Merupakan kegiatan penilaian kesehatan koperasi berdasarkan petunjuk teknis deputi bidang perkoperasi No.15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dumai	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	21 Unit usaha	75.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Dumai	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	21 Unit usaha	193.600.000	Merupakan Kegiatan HUT Koperasi dan penilaian bagi koperasi berprestasi
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dumai	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21,55%	241.810.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dumai	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	21,55%	598.950.000	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	60 orang	241.810.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	60 orang	598.950.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dumai	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	241.810.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dumai	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	598.950.000	Merupakan Kegiatan Pelatihan bagi Pengurus Koperasi berdasarkan Permenkop No.6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam penyelenggaraan TKBM, Permenkop No. 18 tahun 2015 tentang Pedoman, Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dumai	Peresentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,50%	100.000.000	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dumai	Peresentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,50%	121.000.000	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100 Orang	100.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100 Orang	121.000.000	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	100.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 keluarga	121.000.000	Merupakan Pelatihan Pembuatan Kue Kering atau Basah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dumai	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	15%	440.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dumai	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	15%	2.438.900.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dumai	Jumlah usaha mikro	7560 UMKM	440.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dumai	Jumlah usaha mikro	7560 UMKM	2.438.900.000	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	50.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	55.000.000	Pada kegiatan kemitraan yang diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai untuk melakukan kemitraan pada pelaku usaha, sesuai perintah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah SDM yang Telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	210 Orang	20.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dumai	Jumlah SDM yang Telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	210 Orang	1.000.000.000	Pada awalnya kegiatan yang akan dilaksanakan salah satunya memberikan bantuan permodalan pelaku usaha sesuai program prioritas walikota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dumai	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	53.000.000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dumai	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	389.450.000	Melakukan sosialisasi halal, sesuai perintah kementerian agama untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal.
	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Dumai	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	42.000.000	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Dumai	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20 Unit Usaha	330.000.000	Melakukan pengembangan untuk tempat atau wadah pelaku usaha untuk memberikan kesempatan usaha dan sumber pendapatan bagi pelaku
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dumai	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	840 Unit Usaha	225.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Dumai	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	840 Unit Usaha	330.000.000	Mengumpulkan data dan melakukan pembinaan perkecamatan yang ada di Kota Dumai
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	50.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	50 Orang	334.450.000	Untuk menambah dan memberikan pengetahuan serta informasi untuk pengembangan usaha bagi pelaku usaha Kota Dumai
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dumai	Persentase jumlah UMKM yang dibina	4%	169.510.495	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dumai	Persentase jumlah UMKM yang dibina	4%	523.500.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dumai	Jumlah UMKM yang dibina	200 Unit Usaha	169.510.495	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dumai	Jumlah UMKM yang dibina	200 Unit Usaha	523.500.000	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dumai	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	169.510.495	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dumai	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	523.500.000	Untuk membantu pelaku usaha dalam promosi, perbaikan kemasan dan pemasaran produk pelaku usaha yang ada di Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dumai	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	78%	50.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dumai	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	78%	981.100.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	4 Dokumen	50.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	4 Dokumen	981.100.000	
	Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	385.000.000	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahaan industri	Dumai	Jumlah Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahaan industri	Dumai	Jumlah Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	254.100.000	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	242.000.000	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dumai	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	30%	100.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dumai	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	30%	254.100.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	254.100.000	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi. Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	5 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi. Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	5 Dokumen	254.100.000	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 25 ayat 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang kebijakan industri nasional 2020-2024 pasal 41, 42 (Izin usaha Industri), Pasal 16 tentang SIINas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS pengintegrisian SIINas dalam sistem OSS

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dumai	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	70%	-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dumai	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	70%	199.650.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINas	3 Dokumen	-	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINas	3 Dokumen	199.650.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	-	Fasilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	100.000.000	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 25 ayat 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang kebijakan industri nasional 2020-2024 pasal 41, 42 (Izin usaha Industri), Pasal 16 tentang SIINas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS pengintegrisian SIINas dalam sistem OSS
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	-	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	99.650.000	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 25 ayat 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang kebijakan industri nasional 2020-2024 pasal 41, 42 (Izin usaha Industri), Pasal 16 tentang SIINas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS pengintegrisian SIINas dalam sistem OSS
Total					7.397.167.500					13.506.347.005	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami review usulan program dan kegiatan masyarakat pada RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagaimana pada tabel 2.5

Tabel 2.5 (T-C32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kota Dumai

Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volum	Catatan
1.					
2.					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan Pembangunan Provinsi Riau dan RPJMD Kota Dumai. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah .

Tabel 3.1

No	Prioritas Nasional	Proritas Pembangunan Daerah	Bidang Pada Dinas
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industry dan kepelabuhanan	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan usaha mikro,dan Bidang Perindustrian

2.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya melayu	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan usaha mikro.
----	---	---	--

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menunjukkan adanya hubungan untuk koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga kedepan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berupaya untuk lebih meningkatkan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB (kategori industry pengolahan).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) dan merupakan pencapaian dari tujuan dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah **Terwujudnya pemerataan pendapatan koperasi dan UKM** dan Meningkatkan kontribusi sektor Industri pada PDRB Kota Dumai dengan indikator Tujuan

- Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
- Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha
- Persentase penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. sasaran renja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai selaras sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya sebagaimana berikut ini.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota koperasi dan UKM dengan indikator sasaran :
 - Persentase Koperasi aktif dengan target 72 %
 - Persentase Usaha Mikro dan Kecil dengan target 56%
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah dengan indikator sasaran :
 - Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dengan target 62,2%
 - Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin dengan target 15%

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan Program yang mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.
- Adanya RPD kota Kota Dumai
- RPJMD dan RKPD
- Standar Operasional Prosedur (SOP)

A. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
5. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
8. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
9. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
10. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Tabel T-C.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Dumai

Nama OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Koperasi dan UKM	Dumai	100%	6.684.297.005	APBD Dumai		100%	12.146.896.992
2 17 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dumai	9 Dokumen	34.456.193	APBD Dumai		13 Dokumen	73.205.000
2 17 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	2.558.185	APBD Dumai		2 Dokumen	6.050.000
2 17 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	2.551.500	APBD Dumai		2 Dokumen	6.050.000
2 17 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	2.452.450	APBD Dumai		2 Dokumen	6.050.000
2 17 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dumai	1 Dokumen	2.466.345	APBD Dumai		2 Dokumen	6.050.000
2 17 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	3 Dokumen	24.427.713	APBD Dumai		4 Laporan	29.040.000
2 17 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	2 Dokumen	-	APBD Dumai		1 Laporan	-
2 17 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	2 Laporan	-	APBD Dumai		2 Laporan	19.965.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	8 Dokumen	4.213.859.195	APBD Dumai		10 Dokumen	6.914.848.737
2 17 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	31 Orang/bulan	4.154.796.800	APBD Dumai		31 Orang	6.820.248.737
2 17 01 2 02 05	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	1 Laporan	3.695.295	APBD Dumai		2 laporan	22.000.000
2 17 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dumai	7 Laporan	55.367.100	APBD Dumai		7 laporan	56.100.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai	1 laporan	-	APBD Dumai		1 laporan	16.500.000
2 17 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Dumai	2 Laporan	43.338.800	APBD Dumai		4 laporan	66.550.000
2 17 01 2 03 01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dumai	1 Dokumen	-			2 Laporan	6.050.000
2 17 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	1 Laporan	43.338.800	APBD Dumai		2 Laporan	60.500.000
2 17 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dumai	14 Orang	50.000.000	APBD Dumai		16 Orang	238.975.000
2 17 01 2 05 09	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dumai	2 Orang	-	APBD Dumai	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	2 Orang	24.200.000
2 17 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	2 Orang	-	APBD Dumai	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	2 Orang	33.275.000
2 17 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur	Dumai	10 Orang	50.000.000	APBD Dumai	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	12 orang	181.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	3 Dokumen	577.732.852	APBD Dumai		3 Dokumen	1.440.466.407
2 17 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dumai	4 paket	6.781.300	APBD Dumai		4 Paket	48.400.000
2 17 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dumai	4 paket	98.149.838	APBD Dumai		4 Paket	205.700.000
2 17 01 2 06 03	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dumai	12 paket	21.250.074	APBD Dumai		12 Paket	60.500.000
2 17 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dumai	11 paket	21.624.400	APBD Dumai		12 Paket	36.300.000
2 17 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dumai	4 paket	20.005.730	APBD Dumai		4 Paket	42.350.000
2 17 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dumai	1 Dokumen	8.940.000	APBD Dumai		1 Dokumen	18.150.000
2 17 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dumai	1 Dokumen	4.125.000	APBD Dumai		1 Laporan	12.100.000
2 17 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	1 laporan	396.856.510	APBD Dumai		1 Laporan	1.016.966.407

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Dumai	11 Unit	415.499.405	APBD Dumai		55 Unit	1.542.651.848
2 17 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dumai	1 Unit	-	APBD Dumai		1 Unit	166.651.848
2 17 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dumai	2 Unit	-	APBD Dumai		1 Unit	424.550.000
2 17 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Dumai	7 Unit	90.000.000	APBD Dumai		22 unit	121.000.000
2 17 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dumai	4 Unit	105.000.000	APBD Dumai		30 Unit	477.950.000
2 17 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dumai	1 Unit	220.499.405	APBD Dumai	Untuk melakukan pembinaan mental spritual dan tempat parkir belum ada	1 Unit	352.500.000
2 17 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	3 Laporan	1.060.690.560	APBD Dumai		3 Laporan	1.178.300.000
2 17 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	1 laporan	2.370.000	APBD Dumai		1 laporan	6.050.000
2 17 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dumai	1 laporan	202.926.240	APBD Dumai		1 laporan	272.250.000
2 17 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dumai	1 laporan	855.394.320	APBD Dumai		1 laporan	900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Dumai	44 unit	288.720.000	APBD Dumai		38 Unit	691.900.000
2 17 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dumai	1 Unit	38.000.000	APBD Dumai		1 Unit	48.400.000
2 17 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dumai	14 Unit	137.380.000	APBD Dumai		8 Unit	302.500.000
2 17 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dumai	28 Unit	15.840.000	APBD Dumai		28 Unit	121.000.000
2 17 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dumai	1 Unit	97.500.000	APBD Dumai		1 Unit	220.000.000
2 17 03 2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	40%	947.000.000	APBD Dumai		45%	947.000.000
2 17 03 2 01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Dumai	110 Unit Usaha	947.000.000	APBD Dumai		114 Unit Usaha	947.000.000
2 17 03 2 01 03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Dumai	45 Unit Usaha	473.500.000	APBD Dumai	Merupakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan tata kelola kelembagaan koperasi berdasarkan Undang-undang tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan dan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan Permenkop dan UKM No. 09/PER/M.KUKM/X/2020 tentang pengawasan Koperasi	47 Unit Usaha	473.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 03 2 01 04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Dumai	65 Unit Usaha	473.500.000	APBD Dumai	Merupakan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan tata kelola kelembagaan koperasi berdasarkan Undang-undang tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2001 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, UKM dan petunjuk teknis deputy bidang perkoperasi No.15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi	67 Unit Usaha	473.500.000
2 17 04 2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	13,13%	757.850.000	APBD Dumai		15,13%	736.850.000
2 17 04 2 01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	Dumai	52 Unit Usaha	757.850.000	APBD Dumai		56 Unit Usaha	736.850.000
2 17 04 2 01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dumai	26 Unit Usaha	564.250.000	APBD Dumai	Merupakan kegiatan penilaian kesehatan koperasi berdasarakan petunjuk teknis deputy bidang perkoperasi No.15 tahun 2021 tentang pedoman kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi	27 Unit Usaha	472.270.000
2 17 04 2 01 03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Dumai	27 Unit Usaha	193.600.000	APBD Dumai	Merupakan Kegiatan HUT Koperasi dan penilaian bagi koperasi berprestasi	29 Unit Usaha	264.580.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 05 2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	25,55%	598.950.000	APBD Dumai		25,55%	598.950.000
2 17 05 2 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	70 Orang	598.950.000	APBD Dumai		75 Orang	598.950.000
2 17 05 2 01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Dumai	70 Orang	598.950.000	APBD Dumai	Merupakan Kegiatan Pelatihan bagi Pengurus Koperasi berdasarkan Permenkop No.6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam penyelenggaraan TKBM, Permenkop No. 18 tahun 2015 tentang Pedoman, Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah	75 Orang	598.950.000
2 17 06 2	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peresentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	40%	121.000.000	APBD Dumai		37,50%	383.200.000
2 17 06 2 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Dumai	125 Orang	121.000.000	APBD Dumai		22 Orang	383.200.000
2 17 06 2 01 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Dumai	100 Keluarga	121.000.000	APBD Dumai	Merupakan Pelatihan Pembuatan Kue Kering atau Basah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga	100 Keluarga	133.100.000
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Dumai	25 Unit Usaha	-			20 Unit Usaha	250.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 07 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Dumai	25%	2.438.900.000	APBD Dumai		30%	2.988.900.000
2 17 07 2 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro	Dumai	11.000 UMKM	2.438.900.000	APBD Dumai		11.500 UMKM	2.988.900.000
2 17 07 2 01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Dumai	63 UMKM	55.000.000	APBD Dumai	Pada kegiatan kemitraan yang diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Dumai untuk melakukan kemitraan pada pelaku usaha, sesuai perintah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021	70 UMKM	60.500.000
2 17 07 2 01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Dumai	250 UMKM	1.000.000.000	APBD Dumai	Pada awalnya kegiatan yang akan dilaksanakan salah satunya memberikan bantuan permodalan pelaku usaha sesuai program prioritas walikota	300 UMKM	1.406.110.000
2 17 07 2 01 011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dumai	35 Unit Usaha	389.450.000	APBD Dumai	Melakukan sosialisasi halal, sesuai perintah kementerian agama untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang <u>Penyelenggaraan Bidang</u>	40 Unit Usaha	428.395.000
2 17 07 2 01 013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Dumai	25 Unit Usaha	330.000.000	APBD Dumai	Melakukan pengembangan untuk tempat atau wadah pelaku usaha untuk memberikan kesempatan usaha dan sumber pendapatan bagi pelaku usaha	30 Unit Usaha	363.000.000
2 17 07 2 01 014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Dumai	1260 Unit Usaha	330.000.000	APBD Dumai	Mengumpulkan data dan melakukan pembinaan perkecamatan yang ada di Kota Dumai	1680 Unit Usaha	363.000.000
2 17 07 2 01 015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dumai	55 Orang	334.450.000	APBD Dumai	Untuk menambah dan memberikan pengetahuan serta informasi untuk pengembangan usaha bagi pelaku usaha Kota Dumai	60 Orang	367.895.000

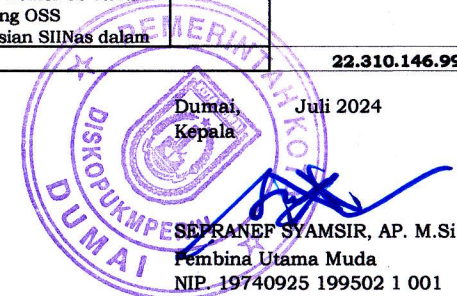
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 17 08 2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah UMKM yang dibina	Dumai	7%	523.500.000	APBD Dumai		10%	2.073.500.000
2 17 08 2 01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina	Dumai	200 UMKM	523.500.000	APBD Dumai		250 UMKM	2.073.500.000
2 17 08 2 01 06	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Dumai	200 UMKM	523.500.000	APBD Dumai	Untuk membantu pelaku usaha dalam promosi, perbaikan kemasan dan pemasaran produk pelaku usaha yang ada di Kota Dumai	250 UMKM	2.073.500.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Dumai			APBD Dumai			
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		Dumai			APBD Dumai			
3 31 02 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda	Dumai	78%	981.100.000	APBD Dumai		80%	1.931.100.000
3 31 02 2 01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan Rencana pembangunan Industri	Dumai	4 Dokumen	981.100.000	APBD Dumai		4 Dokumen	1.931.100.000
	Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	385.000.000	APBD Dumai	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana	1 Dokumen	385.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri		1 Dokumen	254.100.000	APBD Dumai	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-	1 Dokumen	254.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 31 02 2 01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dumai	1 Dokumen	242.000.000	APBD Dumai	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038	1 Dokumen	242.000.000
3 31 02 2 01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dumai	1 Dokumen	100.000.000	APBD Dumai	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 11 ayat 1, 2, 3 dan 4, Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038	1 Dokumen	1.050.000.000
3 31 03 2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau	Dumai	25%	254.100.000	APBD Dumai		35%	304.100.000
3 31 03 2 01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian, dan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan melalui SIINAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS dan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	5 Dokumen	254.100.000	APBD Dumai		12 Dokumen	304.100.000
3 31 03 2 01 01	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sintem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dumai	5 Dokumen	254.100.000	APBD Dumai	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 25 ayat 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang kebijakan industri nasional 2020-2024 pasal 41, 42 (Izin usaha Industri), Pasal 16 tentang SIINas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun	12 Dokumen	304.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 31 04 2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Dumai	70%	199.650.000	APBD Dumai		75%	199.650.000
3 31 04 2 01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan Evaluasi Perusahaan Industri dan perluasan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian Data Ke SIINas	Dumai	3 Dokumen	199.650.000	APBD Dumai		2 Dokumen	199.650.000
3 31 04 2 01 01	Facilitasi Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dumai	2 Dokumen	100.000.000	APBD Dumai	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 25 ayat 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang kebijakan industri nasional 2020-2024 pasal 41, 42 (Izin usaha Industri), Pasal 16 tentang SIINas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS	1 Dokumen	100.000.000
3 31 04 2 01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dumai	1 Dokumen	99.650.000	APBD Dumai	Perlu ditambah karena sesuai dengan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian pasal 25 ayat 7, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 Tentang kebijakan industri nasional 2020-2024 pasal 41, 42 (Izin usaha Industri), Pasal 16 tentang SIINas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS pengintegrisian SIINas dalam	1 Dokumen	99.650.000
Total					13.506.347.005			22.310.146.992	

Dumai, Juli 2024
Kepala

SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi perangkat daerah sebagai pelaksana program, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, diharapkan dana yang tersedia benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu perangkat daerah juga membuat rencana aksi dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang dalam OPD, OPD dengan perangkat daerah lainnya, maupun OPD dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						13.506.347.005,00							17.265.056.706,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.071.497.005,00							14.830.206.706,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						12.071.497.005,00							14.830.206.706,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100 %				6.684.297.005,00						100 %	7.351.906.706,00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	15 Dokumen				16 Dokumen	34.456.193,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	15 Dokumen	19.220.513,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen				1 Dokumen	2.558.185,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.814.004,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2 Dokumen				1 Dokumen	2.551.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.806.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen				1 Dokumen	2.452.450,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.697.695,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen				1 Dokumen	2.466.345,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.712.980,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan			3 Laporan	24.427.713,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Laporan	8.189.184,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	10 Dokumen			10 Dokumen	4.213.859.195,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	10 Dokumen	4.622.054.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	31 Orang/bulan			31 Orang/bulan	4.154.796.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	31 Orang/bulan	4.570.276.480,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	3.695.295,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	4.064.825,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	7 Laporan			1 Laporan	55.367.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	7 Laporan	47.713.655,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	43.338.800,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Dokumen	47.672.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	43.338.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	47.672.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	19 Orang			16 Orang	50.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	19 Orang	238.975.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang			2 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Orang	24.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2 Orang			2 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Orang	33.275.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	7 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	15 Orang	181.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen			3 Dokumen	577.732.852,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	3 Dokumen	488.760.516,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket			4 Paket	6.781.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Paket	7.459.430,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket			4 Paket	98.149.838,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Paket	75.562.122,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket			12 Paket	21.250.074,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	12 Paket	23.375.081,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket			11 Paket	21.624.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	11 Paket	23.786.840,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket			4 Paket	20.005.730,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Paket	22.006.303,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	8.940.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Dokumen	9.834.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan			1 Laporan	4.125.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	4.537.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 Laporan			1 Laporan	396.856.510,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	322.199.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	55 Unit			55 Unit	415.499.405,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	55 Unit	567.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	22 Unit			7 Unit	90.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	22 Unit	99.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	30 Unit			7 Unit	105.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	30 Unit	115.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	220.499.405,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		352.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	3 Laporan			3 Laporan	1.060.690.560,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	3 Laporan	1.160.123.976,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			1 Laporan	2.370.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	2.607.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	202.926.240,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	223.218.864,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan			1 Laporan	855.394.320,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	934.298.112,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	38 Unit			38 Unit	288.720.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	38 Unit	208.099.061,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit			2 Unit	38.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Unit	41.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	8 Unit			14 Unit	137.380.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	8 Unit	114.202.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	28 Unit			28 Unit	15.840.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	28 Unit	17.424.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	97.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		34.673.061,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	40 %			40 %	947.000.000,00						40 %	947.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	110 Unit Usaha			110 Unit Usaha	947.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Koperasi	110 Unit Usaha	947.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	47 Unit Usaha			45 Unit Usaha	473.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Koperasi	47 Unit Usaha	473.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	67 Unit Usaha			65 Unit Usaha	473.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Koperasi	67 Unit Usaha	473.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,13 %			13,13 %	757.850.000,00						13,13 %	736.850.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	56 Unit Usaha			52 Unit Usaha	757.850.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Koperasi	56 Unit Usaha	736.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	27 Unit Usaha			26 Unit Usaha	564.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Koperasi	27 Unit Usaha	472.270.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			<i>Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan</i>	29 Unit Usaha			27 Unit Usaha	193.600.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Koperasi	29 Unit Usaha	264.580.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,55 %			25,55 %	598.950.000,00						25,55 %	598.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota</i>	75 Orang			70 Orang	598.950.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pengurus Koperasi	75 Orang	598.950.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	75 Orang			70 Orang	598.950.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pengurus Koperasi	75 Orang	598.950.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	40 %			40 %	121.000.000,00						40 %	133.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	22 Orang			22 Koperasi	121.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Koperasi	22 Orang	133.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	100 Keluarga			100 Keluarga	121.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Koperasi	100 Keluarga	133.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG BERMITRA	25 %			25 %	2.438.900.000,00						25 %	2.988.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Usaha mikro</i>	15120 UMK M			10080 UMKM	2.438.900.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	UMKM	15120 UMK M	2.988.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	120 Unit Usaha			63 Unit Usaha	55.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	UMKM	70 Unit Usaha	60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	300 Unit Usaha			250 Unit Usaha	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkata n Perekono mian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	UMKM	300 Unit Usaha	1.406.110.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	40 Unit Usaha			35 Unit Usaha	389.450.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkata n Perekono mian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	UMKM	40 Unit Usaha	428.395.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	30 Unit Usaha			25 Unit Usaha	330.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	UMKM	30 Unit Usaha	363.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	1680 Unit Usaha			1260 Unit Usaha	330.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	UMKM	1680 Unit Usaha	363.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	60 Orang			55 Orang	334.450.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	UMKM	60 Orang	367.895.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	7 %			7 %	523.500.000,00						7 %	2.073.500.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah UMKM yang dibina Jumlah UMKM yang dibina Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Manajemen Usaha, Kemasan dan Merk bagi IKM/UKM, Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha bagi</i>	115 UMKM			115 UMKM 115 UMKM 455 UMKM	523.500.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	UMKM	115 UMKM	2.073.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	385.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Dokumen	1 Dokumen	385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	254.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi 01. PEMBA NGUNAN EKONOMI MASYARA KAT SEBAGAI PENDUKU NG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPE LABUHAN AN	Dokumen	1 Dokumen	254.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	242.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	242.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	1.050.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU	30 %			30 %	254.100.000,00						30 %	304.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Industri yang diberikan fasilitas</i>	12 Dokumen			5 Dokumen	254.100.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	12 Dokumen	304.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			<i>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>	12 Dokumen			5 Dokumen	254.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	12 Dokumen	304.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB/KOTA YANG MASUK DALAM SIINAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB/KOTA	70 %			70 %	199.650.000,00						70 %	199.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri</i>	2 Dokumen			3 Dokumen	199.650.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Dokumen	2 Dokumen	199.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>	1 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	99.650.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Dokumen	1 Dokumen	99.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H							13.506.347.005,00							17.265.056.706,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Bagi Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Dumai tahun 2025. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan

alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2025 lebih pada aspek administrasi dan teknis. Secara administrasi, permasalahan yang muncul adalah lemahnya sistem administrasi dengan belum sempurnanya penerapan standar operasional prosedur. Sedangkan secara teknis, minimnya SDM yang berkualifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa menjadi kendala yang cukup serius. Namun dapat diatasi dengan adanya LPSE dan ULP. Kedepan, diharapkan kelemahan-kelemahan tadi dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri.

Dumai, Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perindustrian
Kota Dumai,



SEPRANEF SYAMSIR, AP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001